

KONSEP ETIKA POLITIK DALAM PEMAHAMAN AGAMA

Eka Zuliana

(Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Alwashliyah Medan)
Email: ekazuliana1@gmail.com

ABSTRAK

Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan hukum dan kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa etika berpolitik sangat identik dengan moral. Bagi negara Indonesia, etika politik adalah Pancasila. Namun, melihat perpolitikan di Indonesia saat ini mulai tidak menampilkan etika politik. Salah satu permasalahan yang menarik, etika politik dalam pemahaman agama, meliputi agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, agama Nasrani, dan agama Islam.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, menganalisis, dan menjelaskan untuk mengetahui konsep etika politik dalam pemahaman agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, agama Nasrani, dan Agama Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan cara meneliti, membaca, dan memahami buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) atau analisis tekstual dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative* dan *socio-historis*.

Etika politik dalam pemahaman agama, meliputi agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, agama Nasrani, dan agama Islam. *Pertama*, dalam ajaran Yahudi, fondasi membentuk etika adalah *the self* (diri) selalu bertanggung jawab dari pada *the other* (orang lain). *Kedua*, dalam ajaran agama Budha, etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. *Ketiga*, etika politik agama Hindu tertuang dalam *Nitisastra*. *Keempat*, etika politik agama Nasrani yaitu adanya pemisahan gereja dengan negara, antara agama dan politik. *Kelima*, dalam agama Islam, Nabi Muhammad Saw., telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial-politik yang terbuka, yang memberi keleluasaan bagi adanya partisipasi warga masyarakat kaum beriman.

Kata kunci: Etika Politik, Pemahaman Agama

A. PENDAHULUAN

Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Secara historis etika sebagai usaha filsafat yang lahir dari keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu.¹

Asal kata etika berasal dari bahasa Yunan, yaitu “*ethos*” yang berarti watak atau adat. Kata ini identik dengan asal kata moral dari bahasa Latin “*mos*” yang juga berarti adat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktik sekelompok manusia.²

Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia ingin menjadi baik. Hal itu juga berlaku bagi kaum agama yang memerlukan etika.³

Fokus etika adalah menggambarkan dan mengevaluasi alasan yang diberikan oleh orang atau kelompok untuk penilaian yang mereka buat mengenai benar dan salah atau baik dan buruk, khususnya ketika istilah-istilah itu berhubungan dengan tindakan, sikap dan kepercayaan manusia.

Etika politik, memang tidak dapat menawarkan suatu sistem normatif

sebagai dasar negara, etika politik tidak berada di tingkat system legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara kedalam realitas politik yang nyata, misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan social, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani dan sebagainya.⁴

Menurut Yahya A. Muhaimin kehidupan demokratis paling tidak memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati dan memerlukan penerapan etika politik termasuk disini ialah nilai-nilai budaya yang tertanam pada warga masyarakat. Aturan dan norma-norma ini berada pada posisi sentral untuk bias menyelesaikan pertentangan dan konflik kepentingan antar warga negara.⁵

Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah masalah pemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit di negeri ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai macam bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindakan pelanggaran lainnya dalam kehidupan

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 15.

² Muhammad Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), h. 23.

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, h. 17.

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. 2, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), h. 7.

⁵ Yahya A. Muhaimin, *Etika Pembangunan Politik*, dalam Nourouzzaman Shiddiqi dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 47.

politik dan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya melahirkan berbagai macam krisis dalam kehidupan politik bangsa.

Masalah moralitas, kepemimpinan dan kesantunan dalam berpolitik menjadi persoalan panjang yang tidak terselesaikan dalam kehidupan politik bangsa. Perilaku para elit politik yang seringkali meninggalkan nilai-nilai moral luhur dalam melakukan aktifitas politiknya, telah mencederai persoalan moral dalam kehidupan politik bangsa ini. Berbagai solusi telah di tawarkan sebagai upaya dalam penyelesaian persoalan kemerosotan moral di bidang politik yang menimpah bangsa ini. Salah satunya agar suatu bangsa kembali pada ajaran agama sebagai upaya mengatasi persoalan kemerosotan moral terutama yang terjadi pada elit politik. Tidak kalah pentingnya pada masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Persoalan etika ini menggambarkan makna sentral semangat kepatuhan pada hukum atau atauran sebagai tiang pancang masyarakat berperadaban. Menurut bahasa politik modern ini adalah orientasi hukum dan keadilan yang mendasari perkembangan suatu peradaban. Orientasi ini sangat penting dalam menumbuhkan negara hokum dan mencegah munculnya negara kekuasaan.⁶

Prinsip moral kemanusiaan itu sendiri sangat terkait dengan agama

⁶ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 107.

terutama dengan rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan hanya terwujud jika dilandasi rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan yang lepas dari rasa ketuhanan akan menyebabkan terjadinya praktik-praktik pemutlakan sesame manusia. Oleh sebab itu kemanusiaan sejati harus bertujuan pada keridhoaan Tuhan semata. Orientasi keridhaan Tuhan ini merupakan landasan bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan seseorang.⁷

Etika politik dalam masyarakat memiliki fungsi pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Setiap masyarakat negara memiliki patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif yang dipakai dalam etika politik masing-masing. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi dan konsep manusia yang dianut.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah utama yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah konsep etika politik dalam pemahaman agama. Masalah utama tersebut akan di teliti kedalam sub-sub masalah sebagai berikut:

⁷Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 102.

⁸ Dwi Siswanto, *Konvergensi Antara Liberalisme dan Kolektivisme Sebagai Dasar Etika Politik Di Indonesia*, *Jurnal Filsafat*, Jilid 38 No. 3, (Desember 2004), h. 275.

1. Bagaimana pengertian etika, politik, dan etika politik?
2. Bagaimana konsep etika politik dalam pemahaman agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, Agama Nasrani, dan Agama Islam?

C. LANDASAN TEORI

Konsep adalah rancangan, ide atau suatu pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa Konkrit ataupun gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada diluar bahsa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁹

Etika politik adalah kumpulan atas nilai yang berkenaan dengan ahklak, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Politik yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap warga negara hukum yang berlaku.

D. TUJUAN PENELITIAN

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 588.

Secara umum tujuan politik penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, menganalisis dan menjelaskan tentang etika politik. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian etika, politik, dan etika politik.
2. Untuk mengetahui konsep etika politik dalam pemahaman agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, agama Nasrani, dan agama Islam.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative* dan *socio-historis*, yang dimaksud dengan pendekatan *normative* disini adalah suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat dan pemikiran yang dihasilkan oleh suatu sumber tersebut.

Pendekatan *socio-historis* adalah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya hasil

interaksi dengan lingkungan sosio kultural yang mengitari.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Karya-karya yang ditulis berkenaan dengan yang diteliti. Sumber data sekunder adalah literatur yang berupa buku-buku baik dalam edisi cetak maupun internet dan tulisan-tulisan lain yang didalamnya terdapat uraian etika politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan kepustakaan, menelusuri karya-karya mengenai topik yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) atau analisis tekstual dengan metode interpretasi. Metode analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk mengungkapkan isi sebuah buku atau pemikiran seseorang dengan menggambarkan situasi dan masyarakat pada waktu pemikiran tersebut dihasilkan dalam bentuk

tulisan.¹⁰ Metode analisis interpretasi yaitu sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data, dan gejala.¹¹

F. PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika, Politik, dan Etika Politik

Moral dipahami sebagai ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral dapat berupa agama, adat istiadat, tradisi dan idiologi – idiologi tertentu. Norma – norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan benar salahnya sikap dan tindakan manusia, dilihat dari baik buruknya manusia dan bukan sebagai peran perilaku tertentu dan terbatas.¹²

Moral bersifat mengarah kedalam diri pribadi manusia. Pancarannya keluar yaitu tindakan bertanggung jawab, menyangkut masalah hak dan kewajiban. Moral terbentuk oleh adanya ketulusan bertindak untuk memenuhi kewajiban – kewajiban yang dikenakan kepada diri sendiri. Hak dan kewajiban memerlukan

¹⁰ Imam Prayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), h. 71.

¹¹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011), h. 49.

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, h. 14.

peraturan bersama melalui sistem hukum. Seperti membentuk lingkaran kesadaran hukum yang adil adalah segi etika yang amat penting.¹³

Keteguhan jiwa diperlukan dalam melakukan tindakan-tindakan etika dan moral. Sebab dalam setiap tindakan etika dan moral terselip semangat mementingkan tujuan yang lebih besar dan bersifat jauh didepan dari pada tujuan kecil berjangka pendek seperti keuntungan pribadi. Menghadapi pilihan etika dan moral itu, tantangannya ialah apakah seseorang mampu menghadapi dan mengalahkan godaan keuntungan jangka pendek dan menyisihkan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak.¹⁴

Dalam kehidupan politik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang ada dasarnya bersifat duniawi, tidak bias lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik harusnya dengan standar ahklak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik. Tuntunan moral yang tinggi dalam etika politik secara konsisten meliputi prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Permasalahan prinsip moral kemanusiaan dan keadilan ini merupakan hal mutlak penting

adanya. Karena merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks.

2. Etika Politik Dalam Pemahaman Agama

a. Agama Yahudi

Etika Yahudi merupakan gabungan dari aturan-aturan Agama Yahudi sendiri dan tradisi etika filsafat Barat. Etika Yahudi terutama bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang moral dan arena itu ia dikelompokkan kedalam etika normatif. Etika normatif sendiri maksudnya adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Didalam etika agama Yahudi ada sikap yang kuat berkenaan dengan moralitas yang berhubungan dengan persoalan kemanusiaan. Etika yahudi menghargai keunikan

¹³ Richard T. De George, *Ethics and Society*, (London: MacMillan, 1968), h. 220.

¹⁴ Nurcholish Madjid, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 114-115.

individu dengan menghilangkan diskriminasi. Etika politik agama Yahudi dalam menegakkan keadilan disuatu negara harus dengan sikap damai dan pembelaan diri, namun Yudaisme tidak menganggap kekerasan dan perang untuk menegakkan keadilan yang selalu salah. Mereka menerima bahwa beberapa jenis perang akan secara etis dibenarkan dan bahwa kadang-kadang dapat diterima secara moral untuk membunuh orang.¹⁵

Seseorang tokoh Yahudi, Emmanuel Levinas, mengemukakan teori etika politiknya. Fondasi membentuk etika berkisar pada klaim dasar bahwa the self (diri) selalu bertanggung jawab dari pada the other (orang lain). Tanggung jawab ini bukan pilihan juga bukan sesuatu yang kita peroleh melalui sosialisasi atau melalui keputusan sadar untuk menjalani kehidupan moral. Tanggung jawab adalah kondisi tempat kita dilahirkan. Dengan demikian ini bukan keputusan kita, tetapi sesuatu keputusan yang di buat untuk kita fakta tak terhindarkan tentang hubungan kita dengan other.

¹⁵https://www.academia.edu/9791517/Bab_I_Agama_Yahudi

Kita diminta bertanggung jawab oleh other, tak peduli apa yang kita mungkin inginkan. Sebagai anggota dari suatu negara kita memikul hak sebagai warga negara atau sebagai imigran yang diakui secara legal. Kita menikmati perlindungan di bawah hukum dan kita cukup sadar akan kewajiban kita pada negara sebagai imbalan atas perlindungan ini. Hubungan dengan other tidak didasarkan pada harapan, pada hak, atau pada ikatan komunitas atau kekeluargaan.¹⁶

b. Agama Budha

Mengenai ketatanegaraan dalam agama Budha tidak diatur secara detail. Namun ada nilai-nilai yang harus diteladani didalam ajarannya, tapi tidak diatur secara mendetail sehingga tidak bias dikatakan bersifat teokratik, tapi juga tidak dipisahkan sama sekali. Konsep-konsep Budhis itu sendiri hanya ada didalam mereka memimpin suatu bangsa di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha.¹⁷

¹⁶<http://teori-teorikritis.blogspot.com/2013/02/teori-etika-politik-emmanuel-levinas.html>

¹⁷ M. Masyur Amin dan Mohammad Nadjib (ed.), *Agama, Demokrasi dan*

Pancasila sebagai etika politik bangsa Indonesia, demokrasi menempati posisi penting dalam sistem ketatanegaraan karena telah mendapat pengakuan secara konstitusional dalam UUD 1945. Dalam ajaran agama Budha etika politik tertuang dalam nilai-nilai demokrasi yang dapat ditemukan dalam isi ajarannya maupun dari ketealadan hidup sang guru agung. Etika berpolitik dalam bentuk nilai-nilai demokrasi dalam ajaran Budha juga tersirat dari sikap yang harus dijalankan oleh umat Budha dalam hubungan antar umat beragama yaitu sikap saling menghormati dan toleransi. Hal ini sesuai dengan ajaran Budha khususnya ajaran tentang Sila Pertama yang mengajarkan bahwa setiap orang jangan melakukan perbuatan jahat dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan sehingga menyebabkan orang lain menderita. Sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda sejak dulu merupakan sikap hidup umat Budha. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam *Dhammapada* 1 : 1 = 1 yang berbunyi

Transformasi Sosial, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), h. 84.

Manopubbangama dhamma. Manosettha manomaya manasa ce paduttthena-bhasati va karoti va tato nam dukkhamanveti-cakkam va vahato padam. Artinya : Pikiran mendahului semua kondisi batin, pikiran adalah pemimpin, segala, segalanya diciptakan oleh pikiran, apabila dengan pikiran yang jahat seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku karenanya seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu jantan yang menariknya.

Mengenai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan syarat utama yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan suatu bangsa.

c. Agama Hindu

Menurut I Gusti Made Ngurah, etika politik Agama Hindu tertuang dalam *Nitisastra*. Kata *Niti* berarti kebijaksanaan duniawi, etika social politik, tuntunan dan ilmu pengetahuan tentang negara atau ilmu politik berdasarkan ilmu agama Hindu. Dalam pengertiannya yang lebih luas, kata *Nitisastra* diartikan sebagai ilmu yang

bertujuan untuk membangun suatu negara, baik dari segi tata negara, tata pemerintahan maupun tata kemasyarakatan. *Nitisastra* lalu diberi makna konsep penataan pemerintahan dan pembangunan negara pada umumnya. *Nitisastra* juga mengajarkan kepatuhan warga negara terhadap hukum dan kebijaksanaan pemerintah, dengan kata lain mengajarkan warganya untuk selalu ikut dalam pembinaan negara. Dalam hal ini *Nitisastra* ikut membina masyarakat untuk menjadi warga yang patuh dan bertanggungjawab dan mewujudkan keselamatan negara, mematuhi undang-undang dan berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan ajaran *Dharma Negara*. Dalam kaitan ini pemerintah dan masyarakat meletakkan nilai-nilai moral ajaran agama Hindu sebagai landasannya. *Nitisastra* mengajarkan kepada masyarakat tentang hukum dan kebijaksanaan negara, menanamkan jiwa patriotisme dan kesadaran untuk membela bangsa dan negara.¹⁸ Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam

¹⁸<http://hukumhindu.blog.com/2012/15/nitisastra>

Canakya Nitisastra, Adhyaya V. Sloka 1 yang berbunyi :

“ *Guru Agnir Dvijatinam, Varnanam Brahmana Guruh, Patireva Guruh Strinam, Sarvasya Bhayagato Guruh*”

Terjemahan : *Dewa Agni* adalah Guru bagi para *Dwijati (Sang Sadaka)*, *Varna Brahmana* adalah Guru bagi *Varna Ksatria, Waisya* dan *Sudra*, Guru bagi seorang istri adalah suami dan seorang tamu adalah Guru bagi semuanya.

Ajaran politik dalam agama Hindu (*Nitisastra*) semuanya bersumber dari kitab suci *Veda*. Aliran *Veda* ini mengalir dan dikembangkan dalam suatu kitab-kitab seperti: *Smerti, Ithiasa, Purana, Tantra, Darsana, Upanishad*, maupun *Lontar-lontar Tatwa* yang ada sekarang ini. Menurut kitab suci *Veda* politik merupakan cara untuk mencapai tujuan (menegakkan *dharma*).¹⁹ Seperti dalam *Yajurveda IX. 40* yang berbunyi: *Mahate Janarajyaya* artinya “semoga Tuhan membimbing kami ke sebuah negara yang berkedaulatan rakyat”.

d. Agama Nasrani

Etika politik agama Nasrani (Kristen) yaitu adanya

¹⁹<http://eko170480.blogspot.com/2013/07/dampak-politik-bagi-kehidupanbernegara.html>

pemisahan gereja dengan negara antara agama dan politik, karena dalam pengamalan mereka, penyatuan antara gereja dan negara, antara agama dan politik hanya akan menghasilkan beban ganda. Gereja kehilangan independensinya untuk mengkritik negara dan negara hanya mencari legitimasi religious dari agama. Sehingga satu-satunya jalan yang dilihat dari kaum reformator memisahkan keduanya sebagai dua yang benar-benar *independent*, sehingga yang satu bias mengkritik yang lain, dan satunya lagi bisa mempertimbangkan yang lain.²⁰

Etika moral Kristen sangat berpegang kuat bahwa agama ditempatkan sebagai sumber inspirasi moral dan etika. Sama seperti agama Kristen di Amerika. Orang Amerika tidak bias menerima calon presiden yang bercerai dan berselingkuh.

Inti sumber etika politik orang Kristen ketika berpartisipasi dalam politik negara adalah kasih. Agama Kristen yang percaya bahwa Tuhan sebagai sumber kebenaran, hukum Ilahi dan

legitimasi etika politik, seyogyanya selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan ketika menetapkan “visi” dan “misi” politiknya. Dalam hal hokum kasih sebagai inti dari ajaran, hukum, ketetapan dan peraturan dari Tuhan, maka itulah yang harus menjadi dasar utama bagi orang Kristen yang terjun ke dunia politik untuk “melayani” masyarakat dan mewujudkan damai sejahtera, keadilan dan ketentraman bersama. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi orang bias mengatakan politik itu kotor. Kotornya politik karena orang yang berpolitik itu sudah mengabaikan etika dan moralitas sebagai makhluk Tuhan yang seharusnya menggunakan semua karunia termasuk kekuasaan untuk memberikan damai sejahtera, keadilan dan ketentraman. Mengenai hal tersebut di jelaskan dalam Alkitab yang berbunyi:

“Ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kebangkitan-Nya kita pun dapat mengalami hidup kemenangan. Apa yang Yesus buat yaitu memberlakukan kasih dan keadilan Allah, telah lama sebelumnya diberitakan oleh para nabi. Amos, misalnya dengan lantang menentang

²⁰ M. Masyur Amin dan Mohammad Nadjib (ed.), *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, h. 27.

kemakmuran dan rasa aman yang palsu. Penindasan oleh penguasa atas rakyat miskin, suap dan ketidakadilan di pengadilan membuat Allah membenci ibadah dan perayaan agama yang meriah. Yang dituntut-Nya adalah agar “keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir”. (Am.5: 24).

Tugas orang Kristen yang terjun ke dunia politik, selain menunjukkan kesejahteraan, damai sejahtera, keadilan dan ketentraman serta kelestarian lingkungan hidup, juga untuk mengajak seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan aktifitas politik yang benar, demi bangsa dan negara serta kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri atau kelompok sendiri.

Etika politik Katolik menurut Piet Go O Carm, dalam buku *Etos dan Moral Politik*, mengatakan berpolitik adalah pengabdian untuk mengupayakan *bonum commune* (kesejahteraan umum). Ini menyangkut orang banyak, bukan hanya orang perorang atau kelompok. Tujuannya adalah mensejahterakan seluruh

bangsa, bahkan sebagian besar umat manusia.²¹

e. Agama Islam

Aplikasi positif keterlibatan Islam dalam urusan politik. *Pertama*, melibatkan diri dalam urusan-urusan politik, maka umat Islam telah melahirkan banyak pejuang tangguh dalam upaya merebut kemerdekaan. *Kedua*, mengkristalkan semangat nasionalisme anti penjajah yang pada akhirnya mempercepat pencapaian kemerdekaan.²²

Etika politik dalam agama Islam dengan mendasarkan pada teks kitab suci Alquran dan Hadis sebagai berikut: 1) Masyarakat muslim awal telah meninggalkan tradisi kehidupan politik yang “modern” dan melembagakan kepemimpinan yang dipilih bukan atas dasar warisan atau keturunan, tapi atas dasar *nasab* (keturunan, prestise), lawan *a'mal* (prestasi). Jadi Nabi Muhammad Saw., telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial-politik yang terbuka, yang memberi keleluasan bagi

²¹ Piet Go O Carm, dkk., *Etos & Moralitas Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

²² Katimin, *Politik Islam Indonesia (Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional)*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2007), h. 66.

adanya partisipasi warga masyarakat kaum beriman. 2) Partisipasi politik bermula dari adanya hak individu. Ia mengandung adanya kebebasan individu, tapi pangkal-pangkal hak ini merupakan sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh manusia-manusia kepada Tuhan dan pengadilan di hari perhitungan. 3) Jalan hidup yang benar bersifat objektif dan “telah dibuat jelas berbeda dari jalan yang sesat”, dengan didasarkan pada Kitab Suci. Namun, jika hak-hak untuk berpartisipasi politik itu ditekan penguasa, maka warga wajib menuntut: “Dengan menuntut hak pribadi yang asasi itu merupakan salah satu bentuk partisipasi sosial politiknya yang amat penting dalam suatu tatanan masyarakat”, dimana tahap itu adalah tahap keyakinan dan sikap. 4) Kebaikan itu harus dalam rangka kebaikan kolektif, dimana individu harus memperhatikan dan dipertimbangkan hak individu itu, sehingga terjalinlah hubungan antar individu yang disusun melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. 5) “Budaya” musyawarah yang di ajarkan kitab suci Alquran surat

Al-“Ashr ayat 3, antara lain harus ada sikap sabar.

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”.

Etika politik bagi kaum muslim adalah berakar dalam ajaran agamanya, dan bersangkutan dengan prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban masing-masing orang dalam masyarakat itu.

Pancasila merupakan identitas etika politik bangsa Indonesia. Umat Islam sekarang mengisi Pancasila dengan Islam. Contohnya musyawarah. Musyawarah itu perintah Alquran. Orang Kristen juga mengatakan kita harus bermusyawarah, tanpa mengatakan itu nilai Islam. Itu berarti, bahwa Indonesia itu Muslim dalam arti etika. Etikanya itu Islam, tapi tidak perlu diberi label Islam.²³

G. PENUTUP

Konsep etika politik dalam pemahaman agama, disini meliputi agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, agama Nasrani, dan agama Islam.

²³ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, h. Xxxviii.

Pertama, dalam ajaran Yahudi, fondasi membentuk etika adalah *the self* (diri) selalu bertanggung jawab dari pada *the other* (orang lain). Tanggung jawab ini bukan pilihan, juga bukan sesuatu yang kita peroleh melalui sosialisasi atau melalui keputusan sadar untuk menjalani kehidupan moral. Sebagai suatu negara, kita memikul hak sebagai warga negara atau sebagai imigran yang diakui secara legal.

Kedua, dalam ajaran agama Budha, etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut menjadi syarat utama yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan suatu bangsa.

Ketiga, etika politik agama Hindu tertuang dalam *Nitisastra* yang mengajarkan kepatuhan warga negara terhadap hukum dan kebijaksanaan pemerintah, dengan kata lain mengajarkan warganya untuk selalu ikut dalam pembinaan negara.

Keempat, etika politik agama Nasrani yaitu adanya pemisahan gereja dengan negara, antar agama dan politik, karena dalam pengamalan mereka, penyatuan antara gereja dan negara, antara agama dan politik hanya akan menghasilkan beban ganda.

Kelima, dalam agama Islam, Nabi Muhammad Saw., telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial-politik yangn terbuka, yang memberi keleluasaan bagi adanya partisipasi warga masyarakat kaum beriman. Partisipasi politik bermula dari adanya hak individu. Kebaikan itu

harus dalam rangka kebaikan kolektif. Adanya budaya musyawarah dalam etika politik. Etika politik kaum muslim berakar dalam ajaran agamanya, dan bersangkutan dengan prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban masing masing orang dalam masyarakat itu.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. Masyur dan Nadjib, Mohammad (ed.), *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993).

Carm, Piet Go O, dkk., *Etos & Moralitas Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

George, Richard T. De, *Ethics and Society*, (London: MacMillan, 1968).

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011).

https://www.academia.edu/9791517/Bab_I_Agama_Yahudi

<http://teori-teorikritis.blogspot.com/2013/02/teorietika-politik-emmanuel-levinas.html>

<http://hukumhindu.blog.com/2012/15/niti-sastra>

<http://eko170480.blogspot.com/2013/07/dampak-politik-bagi-kehidupanbernegara.html>

- Katimin, *Politik Islam Indonesia (Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional)*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2007).
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Madjid, Nurcholish, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Paramadina, 1994).
- Madjid, Nurcholish, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*.
- Muhaimin, Yahya A., *Etika Pembangunan Politik*, dalam Nourouzzaman Shiddiqi dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Prayogo, Imam dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Said, Muhammad, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).
- Siswanto, Dwi, *Konvergensi Antara Liberalisme dan Kolektivisme Sebagai Dasar Etika Politik Di Indonesia*, Jurnal Filsafat, Jilid 38 No. 3, (Desember 2004).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar (Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. 2, (Jakarta: PT Gramedia, 1988).
- Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).